

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.¹ Sehingga bank menerima dana dari masyarakat yang *surplus* dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang defisit dana dengan produk yang ditawarkan ke perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Indonesia menganut *Dual Banking System* maka menerapkan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya ada dua yaitu Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah². Dengan demikian sebenarnya pengertian antara bank dan bank syariah sebenarnya sama tetapi hanya dibedakan dengan kegiatan operasional serta prinsip yang digunakan.

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa lintas pembayaran. Salah satu tujuan didirikan BPRS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi

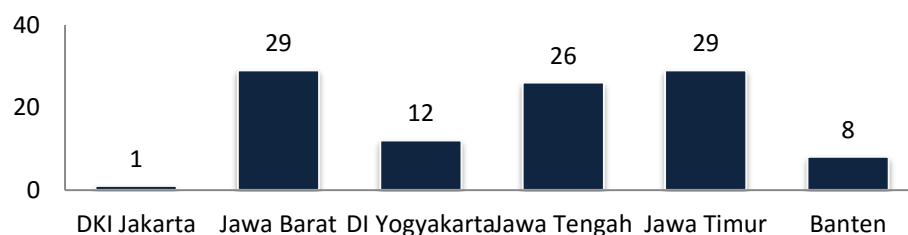
¹ Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2010, hal. 4.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/03/POJK Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

menengah kebawah.³ BPRS mempunyai karakter yang berbeda dengan bank pada umumnya, karena wilayah dan fokus kegiatan operasional BPRS mendapatkan perhatian khusus melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 03/03.POJK/2016, menyebutkan bahwa keberadaan BPRS ditujukan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank pada umumnya. Adanya BPRS ini semoga dapat membantu sektor ekonomi menengah kebawah termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari sisi mikro.

Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah BPRS di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 166 BPRS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63% atau 104 BPRS masih terkonsentrasi di wilayah Jawa. Berikut adalah grafik jumlah BPRS di pulau jawa:

Grafik 1.1 Jumlah BPRS menurut Provinsi di Pulau Jawa Maret 2017



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia Februari 2017 diolah

³Heri Sudarsono. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003, hal. 95.

Dengan jumlah yang cukup banyak ini perlu adanya dukungan agar BPRS di Jawa Barat dan Jawa Timur tetap bertahan dan terhindari dari berbagai resiko dari kegiatan operasional bank. Terutama resiko pembiayaan yang rentan menjadi faktor utama berhentinya sebuah bank. Karena sebagian besar perbankan di Indonesia masih mengandalkan pembiayaan sebagai pemasukan utama dalam membiayai kegiatan operasionalnya.⁴ Berikut adalah data BPRS Pulau Jawa per Maret 2017 dan Jawa Barat menduduki angka tertinggi dibanding provinsi lainnya di pulau jawa

Tabel 1.1 Data Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Menurut Provinsi per Maret 2017

Provinsi	Aset	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
DKI Jakarta	20,984	15,389	10,429
Jawa Barat	2,915,788	2,253,757	1,671,466
Banten	848,450	641,367	647,010
Jawa Tengah	1,042,291	773,669	746,842
DI Yogyakarta	538,354	377,284	404,110
Jawa Timur	1,580,217	1,162,779	939,181

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah Indonesia Februari 2017 diolah

Jumlah BPRS di Jawa Barat dan Jawa Timur yang sama namun dari segi aset, penyaluran pembiayaan maupun dana pihak ketiga sangat berbeda dua kali lipat. Dengan jumlah BPRS yang sama namun dari segi aset Jawa Barat memiliki aset yang paling tinggi diantara provinsi lain di pulau jawa yaitu Rp.2,915,788 (dalam juta rupiah) sedangkan di Jawa Timur tidak setengahnya

⁴Dahlan P. Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi 5.* Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005, hal. 349.

dari itu yaitu Rp 1,580,217 (dalam juta rupiah). Penyaluran pembiayaan di Jawa Barat juga tinggi yaitu Rp 2,253,757 sangat jauh dengan penyaluran pembiayaan di Jawa Timur, hal ini mencerminkan iklim Jawa Barat yang mempunyai kebutuhan dana mikro yang besar dibanding dengan provinsi yang lain di pulau jawa. Dilihat dari dana pihak ketiga yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan akan mempengaruhi likuiditas bank tersebut.

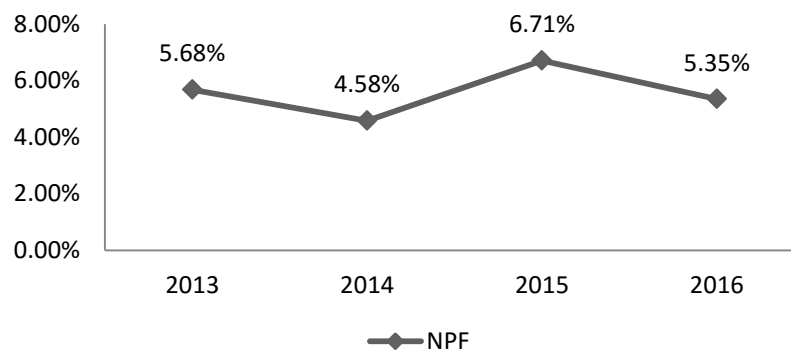
Banyaknya pembiayaan yang disalurkan harus diikuti dengan kualitas pembiayaan tersebut. Bukan tidak mungkin kredit atau pembiayaan yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah.⁵Tidak semua dari penyaluran dana berjalan lancar, beberapa diantara mitra pembiayaan BPRS tidak dapat melakukan angsuran atau pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bank pada umumnya dalam menjalan operasional untuk mendapatkan hasil usaha dihadapkan dengan beberapa resiko. Resiko yang mungkin terjadi pada lembaga keuangan adalah pembiayaan bermasalah.

Akibat dari pembiayaan bermasalah ini yang menyebabkan kerugian bagi bank dengan dipresentasikan oleh rasio Non Performing Financing (NPF). NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan

⁵Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014. Hal. 113.

macet⁶NPF merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu ditinjau ulang karena sifatnya yang tidak stabil sehingga perlu diamati secara lebih lagi. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. Selain itu, NPF merupakan instrumen penilaian kinerja bank yang menjadi tolak ukur baik tidaknya bank dalam menutup kegagalan mitra pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank. Berikut adalah data statistik NPF BPRS di Indonesia pada lima tahun terakhir:

Gambar 1.1 Grafik NPF BPRS Jawa Barat Tahun 2012-2016



Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah Indonesia Februari 2017 diolah

Seperti dilihat pada grafik 1.1 bahwa peningkatan jumlah pembiayaan namun data NPF Jawa Barat lima tahun terakhir diikuti penurunan kualitas pembiayaan dengan naiknya rasio NPF BPRS di Jawa Barat. Di tahun 2015 saja

⁶Halaman Resmi Otoritas Jasa Keuangan diakses 24 Mei 2017

angka rasio NPF mencapai 6,71% naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tidak mencapai 5%. Hal ini perlu menjadi sorotan tingginya NPF di Jawa Barat dengan penyaluran pembiayaan yang tinggi. Sebagian besar perbankan di Indonesia masih mengandalkan pembiayaan sebagai pemasukan utama dalam membiayai kegiatan operasionalnya.⁷

Pembiayaan macet terjadi karena pihak mudharib kesulitan membayar angsuran karena suatu hal. Hutang yang tidak terbayar oleh nasabah akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Selama masalah pembiayaan macet ini belum diselesaikan, bank-bank masih akan menghadapi resiko pembiayaan yang tinggi, yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan operasional bank itu sendiri,

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang diduga akan mempengaruhi nilai NPF dari sisi eksternal yaitu laju inflasi dan internal disebabkan oleh rasio likuiditas bank yang dipresentasikan dengan rasio Financing Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) rasio kekuatan modal, serta kekuatan aktiva bank yang diukur dengan Bank Size (Total Aset) pada BPRS di Jawa Barat.

Financing to Deposit Ratio (FDR), merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan

⁷Dahlan P. Siamat *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi 5. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005. Hal. 349.

oleh bank. Semakin kecil rasio ini maka semakin besar dana pihak ketiga yang tidak disalurkan atau dalam kata lain banyak dana menganggur.⁸ Sehingga semakin besar FDR laba yang diperoleh akan meningkat, dengan asumsi penyaluran pembiayaan terlaksana secara efektif. Tingginya FDR memberi kesempatan bank untuk melakukan penyaluran pembiayaan sehingga kemungkinan resiko NPF meningkat sangat besar. Penelitian Putri (2016) menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Hal sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Popita (2013) dimana FDR berpengaruh positif terhadap NPF.

Bank Size (Total Aset) dijadikan indikator pengaruh dari peningkatan NPF karena total aset dapat menunjukkan kekuatan aset yang dimiliki oleh bank. Bank dengan aset yang besar memiliki kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari aset tersebut. Penelitian yang dilakukan Mada (2015) menyimpulkan bahwa *Bank Size* berpengaruh negatif terhadap NPF. Namun hasil sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Wyana (2015) yang menyimpulkan bahwa *Bank Size* berpengaruh positif terhadap NPF baik dalam jangka panjang dan berpengaruh negatif dalam jangka pendek terhadap NPF.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan, digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki

⁸Taswan. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010, hal. 167.

bank dalam menanggung risiko setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko dan berkontribusi cukup besar terhadap pembiayaan bermasalah.⁹ Semakin tinggi presentase CAR maka semakin besar pula kemampuan bank untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2014) menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF. Namun hasil Diyanti dan Widyarti (2012) dan Maidalena (2014), CAR berpengaruh positif terhadap NPF.

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau jasa selama suatu periodewaktu tertentu.¹⁰ Dengan adanya inflasi berdampak pada menurunnya daya beli. Jika daya beli masyarakat kurang maka akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Akibatnya ada penurunan return yang akan mempengaruhi kemampuan mudharib dalam membayar angsuran pembiayaan. Hasil penelitian Firmansyah (2014) inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan hasil penelitian Diyanti dan Widyarti (2012) inflasi berpengaruh positif terhadap NPF.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh variable makro dan kinerja bank terhadap pertumbuhan atau naik turunnya jumlah NPF di BPRS di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir yaitu Triwulan I 2013-Triwulan I 2017. Alasan menjadikan BPRS sumber penelitian adalah karena BPRS lebih dekat dengan masyarakat ekonomi lemah karena mencangkup sistem ekonomi

⁹Kuncoro dan Suhardjono. Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE, 2002, hal.573.

¹⁰Adiwarman, A. Karim. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: Raja Grafindo.2007, hal. 136.

mikro.UMKM merupakan sektor utama kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia selain pertanian dan mayoritas dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam bentuk dana oleh lembaga keuangan terkait. Pembiayaan khusus untuk UMKM di Jawa Barat sendiri mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,38% setiap tahunnya.¹¹ Dari pemaparan diatas maka saya mengambil penelitian dengan judul “**Determinan Non Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat Tahun 2013-2017**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara parsial antara variabel *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Capital Adequancy Ratio* (CAR) *Bank Size* dan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan variabel *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Bank Size* dan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat?

¹¹. Laporan Tim Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI Pada Masa Reses persiapan II tahun 2015-2016 Ke Provinsi Jawa Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Bank Size* dan Inflasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Bank Size* dan Inflasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk tambahan referensi dalam ilmu perbankan syariah yang berhubungan dengan *Non performing Financing* (NPF) sehingga penelitian selanjutnya akan memiliki tambahan wawasan.
2. Secara Praktis penelitian ini digunakan sebagai wadah mendapatkan wawasan lebih detail tentang perbankan syariah, manajemen pembiayaan serta kususny untuk *Non Performing Finacning* (NPF)itu sendiri.